



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1730/PP.00/09/2019 Jakarta, 04 September 2019
Lampiran : 1 berkas
Hal : Undangan Keikutsertaan
Penilaian Pengelola Jurnal Terakreditasi dan Artikel Hukum dan Konstitusi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum Universitas/Pengelola Jurnal Hukum se-Indonesia
(daftar terlampir)

Di

Tempat

Dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan Anugerah Konstitusi Tahun 2019 pada tanggal 14 November 2019 di Jakarta.

Pada pertemuan tersebut juga akan diberikan Penghargaan kepada Pengelola Jurnal Terakreditasi Terbaik dan Penghargaan terhadap Penulis Artikel Terbaik Tahun 2019. Rangkaian kegiatan di atas, diawali dengan Penilaian Pengelola Jurnal Terakreditasi dan Artikel Hukum dan Konstitusi yang termuat dalam jurnal terakreditasi (Pedoman Penilaian terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu Dekan untuk mengikutsertakan pengelola jurnal dalam kegiatan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n Sekretaris Jenderal

Kepala Puslitka,

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal.



Digital Signature
mk-256590052190902081914

Daftar Undangan Penilaian Pengelolaan Jurnal Terbaik dan Penulis Artikel Jurnal Terbaik Tahun 2019:

NO	NAMA JURNAL	AFILIASI INSTANSI
1	Justicia Islamica	IAIN Ponorogo
2	Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam	IAIN Purwokerto
3	Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan	IAIN Salatiga
4	Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam	IAIN Samarinda
5	Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial	STAIN Pamekasan
6	Yuridika	Universitas Airlangga
7	Arena Hukum	Universitas Brawijaya
8	Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies	Universitas Brawijaya
9	Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies	Universitas Brawijaya
10	Masalah-Masalah Hukum	Universitas Diponegoro
11	MIMBAR HUKUM	Universitas Gadjah Mada
12	Hasanuddin Law Review	Universitas Hasanuddin
13	Jurnal Hukum & Pembangunan	Universitas Indonesia
14	Jurnal Hukum Internasional : Indonesian Journal of International Law	Universitas Indonesia
15	Indonesia Law Review	Universitas Indonesia
16	Indonesia Law Review	Universitas Indonesia
17	Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM	Universitas Islam Indonesia
18	Al-Risalah : Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan	Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
19	Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
20	Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
21	Al-Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga Islam	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
22	Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
23	Al-Ahkam	Universitas Islam Negeri Walisongo
24	JURNAL DINAMIKA HUKUM	Universitas Jenderal Soedirman



25	Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum	Universitas Katolik Parahyangan
26	Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum	Universitas Kristen Satya Wacana
27	Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum	Universitas Lampung
28	Jurnal IUS : Kajian Hukum dan Keadilan	Universitas Mataram
29	Jurnal Media Hukum	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
30	PADJADJARAN: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)	Universitas Padjadjaran
31	Jurnal Bina Mulia Hukum	Universitas Padjadjaran
32	Yustisia	Universitas Sebelas Maret
33	Sriwijaya Law Review	Universitas Sriwijaya
34	Sriwijaya Law Review	Universitas Sriwijaya
35	Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)	Universitas Udayana
36	Jurnal Hukum Islam Fakultas Syari'ah	Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
37	Jurnal Hukum Islam Fakultas Syari'ah	Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
38	De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
39	UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum	Universitas Kuningan
40	Pandecta: Research Law Journal	Universitas Negeri Semarang
41	Kanun Jurnal Ilmu Hukum	Universitas Syiah Kuala
42	TADULAKO LAW REVIEW	Universitas Tadulako
43	Jurnal Hukum PRIORIS	Universitas Trisakti
44	Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum	Universitas Singaperbangsa Karawang
45	Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
46	Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan	Universitas Islam Negeri Alauddin
47	Lentera Hukum	Universitas Jember
48	Istinbath : Jurnal Hukum	Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro
49	Jurnal Hukum Prasada	Universitas Warmadewa
50	Jurnal Penelitian Hukum	Universitas Gadjah Mada



51	LAW REFORM	Universitas Diponegoro
52	Diponegoro Law Review	Universitas Diponegoro
53	Udayana Journal of Law and Culture	Universitas Udayana
54	Lambung Mangkurat Law Journal	Universitas Lambung Mangkurat
55	Asy-Syari'ah	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
56	Jurnal Wawasan Yuridika	Sekolah Tinggi Hukum Bandung
57	Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
58	Dialogia Iuridica : Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi	Universitas Kristen Maranatha
59	JURNAL KOMUNIKASI HUKUM	Universitas Pendidikan Ganesha
60	JURNAL CITA HUKUM	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
61	DiH: Jurnal Ilmu Hukum	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
62	Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran	UIN Antasari Banjarmasin
63	Jurnal Hukum Jurisprudence	Universitas Muhammadiyah Surakarta
64	Jurnal Hukum Novelty	Universitas Ahmad Dahlan
65	Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam	IAIN Syekh Nurjati Cirebon
66	JURNAL HUKUM ISLAM	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
67	Jurnal Cendekia Hukum (JCH)	STIH Putri Maharaja
68	Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	Universitas Islam Negeri Alauddin
69	Jurnal Hukum Media Bhakti	Universitas Panca Bhakti
70	Diversi Jurnal Hukum	Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kadiri
71	JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)	Universitas Negeri Semarang
72	Hang Tuah Law Journal	Universitas Hang Tuah
73	JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)	Institut Agama Islam Negeri Batusangkar



Lampiran:

**PEDOMAN PENILAIAN JURNAL TERAKREDITASI DAN ARTIKEL
KONSTITUSI DAN MAHKAMAH KONSTITUSI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2019**

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibukota negara mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam perkembangannya, untuk kewenangan yang terakhir atas kuasa undang-undang, MK juga memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Selain kewenangan tersebut, MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Seiring dengan pelaksanaan fungsi dan tugas MK untuk memutus perkara-perkara konstitusi, hal yang penting untuk terus ditingkatkan yakni berkaitan dengan dukungan substantif. Dengan adanya dukungan substantif berupa data dan informasi *up to date* serta berbasis pada hasil-hasil penelitian atau kajian ilmiah yang terdiseminasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi di bidang konstitusi dan hukum ketatanegaraan, serta isu-isu penting yang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pengembangan fungsi dan tugas MK ke depan.

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi berdampak pula pada pengelolaan dan penerbitan jurnal ilmiah yang semula tercetak dengan proses cukup lama, kini menjadi lebih cepat dengan proses elektronik, pengiriman, penyuntingan, penelaahan, dan penerbitan naskah karya ilmiah dilaksanakan dalam suatu sistem aplikasi yang dinamakan jurnal elektronik (*e-journal*). Dengan sistem tersebut proses pengindeksan dan dampak ilmiah atau sitasi suatu tulisanpun dapat diketahui dengan cepat, sehingga suatu karya tulis ilmiah dapat diketahui segera dan dapat dimanfaatkan.

Perubahan paradigma dari jurnal ilmiah cetak menjadi jurnal ilmiah elektronik harus diikuti perkembangannya oleh penulis maupun penerbit jurnal di Indonesia,



sehingga hasil karya yang dihasilkan dapat segera diketahui dan dikenal masyarakat baik nasional maupun internasional. Paradigma tersebut juga diikuti penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Dirjen Dikti Nomor 49/DIKTI/Kep/2011.

Dalam rangka memotivasi keseriusan dan mempertahankan mutu pengelolaan jurnal yang memuat isu konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, salah satu organ dalam organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan yaitu Pusat Penelitian dan Pengkajian (Puslitka) memberikan Penghargaan kepada Pengelola Jurnal Terakreditasi Terbaik dan Penghargaan terhadap Penulis Artikel Terbaik Tahun 2018/2019. Penghargaan dilakukan dalam rangka diseminasi isu konstitusi yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga mampu mendukung terciptanya kesadaran berkonstitusi oleh setiap warga negara.

Selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan kegiatan dimaksud perlu disusun ketentuan-ketentuan yang menjadi panduan dalam proses pelaksanaan Penilaian Pengelola Jurnal Terakreditasi dan Artikel Hukum dan Konstitusi yang termuat dalam jurnal terakreditasi yang dilaksanakan pada tahun 2019.

B. TUJUAN

1. Memberikan dukungan substantif dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri;
2. Mendiseminasikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bentuk artikel ilmiah;
3. Memberikan penghargaan pengelola jurnal dan penulis untuk dapat meningkatkan mutu pengelolaan jurnal dan artikel sesuai dengan Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah tahun 2014 dan peningkatan mutu substansi artikel terbitan.

C. SASARAN

1. Penilaian Pengelola Jurnal Terakreditasi Terbaik;
Jurnal yang telah terakreditasi nasional dan memuat artikel-artikel terkait isu hukum dan konstitusi.
2. Penilaian Artikel Hukum dan Konstitusi Terbaik:
Artikel yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi yang memuat isu konstitusi atau Mahkamah Konstitusi.

D. PERSYARATAN PENGELOLA JURNAL TERAKREDITASI DAN ARTIKEL YANG AKAN DINILAI

1. Syarat Pengelola Jurnal Terakreditasi yang akan dinilai:
 - a. Surat usulan dari Pimpinan Lembaga/Institusi atau Dekan bagi perguruan tinggi;



- b. Pengelolaan jurnal yang memenuhi Standar Mutu dan Tata Kelola Nasional;
 - c. Jurnal ilmiah hukum yang terakreditasi melalui Ditjen Dikti/LIPI yang masa akreditasinya masih berlaku;
 - d. Jurnal hukum terakreditasi yang terbit pada tahun 2018/2019;
 - e. Melampirkan syarat administrasi meliputi:
 - 1) Surat Keputusan tentang Pengurus/Pengelola Jurnal yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi;
 - 2) Fotokopi Sertifikat Akreditasi yang masih berlaku;
 - 3) Fotokopi rekening koran/buku tabungan yang tertera nama pemilik rekening, nomor rekening, nama dan alamat bank;
 - 4) Fotokopi NPWP sesuai rekening koran/buku tabungan; dan
 - 5) Daftar isi jurnal terbitan tahun 2018/2019.
 - f. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses lebih lanjut.
2. Syarat Artikel Hukum dan Konstitusi yang akan dinilai:
- a. Surat usulan dari Pimpinan Lembaga/Institusi atau Dekan bagi perguruan tinggi;
 - b. Artikel yang diajukan dan dikirimkan tersebut, diterbitkan dalam jurnal hukum yang terakreditasi;
 - c. Artikel dimuat dalam jurnal hukum terakreditasi yang terbit pada tahun 2018/2019.
 - d. Melampirkan syarat administrasi meliputi:
 - 1) Surat Keputusan tentang Pengurus/Pengelola Jurnal yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi;
 - 2) Fotokopi Sertifikat Akreditasi yang masih berlaku;
 - 3) Fotokopi rekening koran/buku tabungan yang tertera nama pemilik rekening, nomor rekening, nama dan alamat bank; dan
 - 4) Fotokopi NPWP sesuai rekening koran/buku tabungan.
 - e. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses lebih lanjut.

E. UNSUR PENILAIAN

1. Unsur Penilaian Pengelolaan Jurnal:
- a. Manajemen Pengelolaan Jurnal
Antara lain meliputi:
 - pengadopsian *Open Journal System* (OJS);
 - ketepatan waktu terbit;
 - korespondensi dengan *reviewer*; dan
 - b. Substansi Jurnal yang Diterbitkan
Isu-isu Hukum Tata Negara dan Konstitusi antara lain meliputi:



- Komposisi jumlah artikel yang membahas tentang Hukum Tata Negara dan Konstitusi;
- Kemutakhiran isu kontemporer yang diangkat dalam pembahasan tulisan dalam bidang Hukum Tata Negara dan Konstitusi;
- Tingkat ketajaman analisis artikel terhadap isu dan permasalahan yang dibahas dalam artikel; dan
- Kepioniran/originalitas (*novelty*) diukur dari tingkat gagasan baru yang dibahas dalam artikel.

2. Unsur Penilaian Artikel Hukum dan Konstitusi:

Substansi Artikel yang Diterbitkan:

Isu-isu Hukum Tata Negara dan Konstitusi antara lain meliputi:

- Komposisi jumlah artikel yang membahas tentang Hukum Tata Negara dan Konstitusi;
- Kemutakhiran isu kontemporer yang diangkat dalam pembahasan tulisan dalam bidang Hukum Tata Negara dan Konstitusi;
- Tingkat ketajaman analisis artikel terhadap isu dan permasalahan yang dibahas dalam artikel; dan
- Kepioniran/originalitas (*novelty*) diukur dari tingkat gagasan baru yang dibahas dalam artikel.

F. PROSES PENILAIAN ARTIKEL DAN JURNAL TERBAIK

Tim Penilai terdiri dari para pakar dan ahli (mitra bestari) di bidang hukum dan konstitusi yang akan menilai artikel dan jurnal terbaik, serta hasilnya akan dilaporkan kepada Sekertaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

G. JADWAL PENILAIAN

No.	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	4 Oktober 2019	Batas Akhir Penerimaan Usulan Artikel dan Jurnal terbaik di MKRI, melalui e-mail : puslitka@mkri.id cc: puslitka_mk@yahoo.com	Batas akhir pengiriman pukul 24.00 WIB
2.	23-25 Oktober 2019	Evaluasi dan Penilaian	Penilaian substansi dan administrasi oleh <i>reviewer</i>
3.	28 Oktober 2019	Laporan Akhir Hasil Penilaian	Pembuatan Berita Acara dan Surat Keputusan Penilaian
4.	14 November 2019	Pengumuman dan Penghargaan Artikel dan Jurnal Terbaik	Kegiatan dilaksanakan di Jakarta



H. PENGAJUAN USULAN

1. Setiap pengelola jurnal mengirimkan 2 edisi jurnal yang terbit tahun 2018/2019 dalam bentuk *softcopy* berformat *.pdf* dalam satu kesatuan file per edisi (*full issue*).
2. Setiap pengelola jurnal mengirimkan 1 artikel terbaik yang akan diajukan untuk penilaian dalam bentuk *softcopy* dalam format *.pdf*.
3. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dikirimkan ke alamat berikut:

e-mail: puslitka@mkri.id cc: puslitka_mk@yahoo.com

4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi via WA: 0815-7866-7679 (Fuad)

I. PENUTUP

Demikian pedoman ini sebagai bahan acuan dalam penilaian jurnal terakreditasi dan artikel tahun 2019. Apabila terdapat hal-hal yang perlu ditentukan lebih lanjut, akan diputuskan dalam musyawarah Tim Penilai.

a.n Sekretaris Jenderal

Kepala Puslitka



Lampiran:

FORM PENILAIAN PENGELOLA JURNAL TERAKREDITASI 2019

Nama Jurnal : _____

Edisi Jurnal : _____

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	Catatan
1.	Manajemen Pengelolaan Jurnal yang mengadopsi Open Journal System (OJS) dan tepat waktu terbit	0-15		
2.	Jumlah artikel Konstitusi yang memuat Putusan MK, Isu Konstitusi, dan/atau Mahkamah Konstitusi	1-3 artikel = 5 4-6 artikel = 7 7-8 artikel = 9 9-10 artikel = 10 Bobot Nilai x 2		
3.	Isu Konstitusi Kontemporer yang membahas isu terkini mengenai konstitusi	0-15		
4.	Tingkat ketajaman analisis artikel terhadap isu dan permasalahan yang dibahas dalam artikel	0-40		
5.	Kepioniran/ originalitas (novelty) yang membahas gagasan baru dibahas dalam artikel	0-10		
TOTAL				

Penilai,

(_____)



Lampiran:

FORM PENILAIAN ARTIKEL JURNAL TERAKREDITASI 2019

Nama Penulis : _____

Judul Naskah : _____

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	Catatan
1.	Artikel Konstitusi yang memuat Putusan MK, Isu Konstitusi, dan/atau Mahkamah Konstitusi	0-20		
2.	Isu Konstitusi Kontemporer yang membahas isu terkini mengenai konstitusi	0-20		
3.	Tingkat ketajaman analisis artikel terhadap isu dan permasalahan yang dibahas dalam artikel	0-45		
4.	Kepioniran / originalitas (novelty) yang membahas gagasan baru dibahas dalam artikel	0-15		
TOTAL				

Penilai,

(_____)

